

**ANALISIS EKONOMISASI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**

Agusta Amanda Wulandari

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Email : amandaagusta@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif, dengan menggunakan data Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dengan capaian realisasi dalam kategori sangat efektif disebabkan oleh peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2016 sebesar sebesar Rp. 71.147.536.996 atau realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai 102,90%, realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2017 sebesar sebesar Rp. 82.523.663.194 atau realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai 96,18% dan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar sebesar Rp. Rp.97.671.648.062 atau realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai 93,10% Realisasi retribusi daerah untuk tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dimana capaian ini dipengaruhi oleh capaian penerimaan retribusi dari berbagai SKPD yang ditugaskan untuk memungut Retribusi Daerah sebesar 105,39%. Tercapainya realisasi retribusi di atas 100% ini disebabkan oleh karena beberapa dinas / SKPD realisasinya retribusinya di atas 100% di tahun 2013 antara lain Dinas Kesehatan realisasi retribusi mencapai 108%, Dinas Pekerjaan Umum realisasi retribusi mencapai 110%, Badan lingkungan hidup 132,72%, Dinas Sosial 148,07%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 157,35%, Dinas Koperasi dan UKM 119,14%, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 112,58%, Badan Diklat Daerah 128%, Dinas Perikanan 152% dan Dinas Perindustrian 132%. Disarankan agar Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendapatan dan Asset daerah dapat mempertahankan capaian realisasi pajak daerah dan dapat meningkatkan realisasi pajak daerah di tahun-tahun mendatang dengan cara melakukan sosialisasi dan pemberian kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak melalui metode *self Assesment* atau pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung oleh wajib pajak ke kantor pajak.

Kata Kunci : Ekonomis, Efisien dan Efektif

A. PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk penilaian kinerja tersebut, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran adalah konsep Ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas (*Value for Money*), karena merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan *good governance*. Ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas (*Value for Money*) merupakan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis.

Ekonomis adalah tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan anggaran pengeluaran sehingga realisasi pengeluaran tidak melebihi anggaran pengeluaran yang ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu pengukuran ekonomisasi dilakukan

dengan membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran (Mahsun :2006 : 63)

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu ukuran efektivitas menggunakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan (Mahsun :2006 : 68)

Menurut Mulyadi (2003:43) Efisiensi adalah upaya penggunaan ataupun pengeluaran biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan masukan yang berarti. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mendapatkan masukan. Oleh karena itu ukuran yang digunakan adalah membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target pendapatan demikian pula realisasi belanja ada yang melebihi target belanja. Data selengkapnya dapat dilihat dapan tabel berikut ini :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d tahun 2018
(Dispenda Kabupaten Kupang)

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	605.008.354.100	601.859.937.132	777.783.380.647	671.373.439.791
2017	643.745.706.721	679.669.480.719	769.983.638.509	691.319.530.872
2018	757.726.868.872	750.107.692.084	857.629.778.269	756.888.587.797

Data sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak mencapai target pendapatan yang ditentukan sebelumnya untuk tahun 2016 dan 2018 sedangkan untuk tahun 2018 realisasi pendapatan melebihi target yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya data belanja daerah menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 lebih kecil dari yang ditargetkan. Untuk kepentingan perencanaan pendapatan dan belanja daerah maka data keuangan baik pendapatan maupun belanja daerah yang selalu fluktuatif ini perlu diukur tingkat ekonomi, efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Ekonomisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Tujuannya adalah: 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif, dengan menggunakan data Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (2000: 63), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Halim (2004:

230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 2000: 16).

Anggaran

Menurut Mahsun (2012 : 145) Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Menurut Mahmudi (2002 : 59) bahwa Anggaran juga merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh beberapa pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah merupakan instrument perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor public

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Hariadi (2010 : 25) menyebutkan bahwa Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

Tanjung (2002 : 90) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Halim (2004 : 329) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana pengeluaran tahunan daerah yang menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber – sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran – pengeluaran yang telah dianggarkan

Teknik Pengukuran *Value For Money*

Menurut Mahsun (2012 : 186) bahwa tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan Ekonomisasi , Efisiensi dan Efektivitas (*value of money*) dalam menjalankan aktivitasnya, dimana Ekonomisasi , Efisiensi dan Efektivitas (*value of money*) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : 1) Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang

terendah; 2) Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu; 3) Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan pokok *value of money*, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (*equity*) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (*equality*) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Menurut Mahsum (2012 : 186) bahwa manfaat implementasi *value of money*

Pengukuran Ekonomisasi

Jika pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, maka pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relative. Kondisi ekonomi terjadi jika Biaya organisasi lebih kecil dari yang dianggarkan. Mengukur tingkat kehematan dan pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sector public. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data – data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Formulasi untuk mengukur tingkat ekonomi antara lain :

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria Ekonomi :

- ◆ Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis
- ◆ Jika diperoleh Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomi berimbang
- ◆ Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis (Mahsum : 2012 : 186)

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relative. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan output dan input, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara: 1) Meningkatkan output pada tingkat output yang sama; 2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input; 3) Menurunkan output pada tingkat output yang sama; 4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan output.

Menurut Mahsum (2012 : 183) Dalam pengukuran value for money efisiensi dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu efisiensi alokasi yakni efisiensi dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada kapasitas optimal, sedangkan efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Untuk mengukur tingkat input dari organisasi *sector public* terhadap tingkat outputnya *sector public*. Pengukuran efisiensi memerlukan data – data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Formulasi untuk mengukur tingkat efisiensi.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi:

- ✧ Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti Efisiensi
- ✧ Jika diperoleh Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti Efisiensi berimbang
- ✧ Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak Efisiensi (Mahsum : 2012 : 187).

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi biaya bias saja melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua sampai tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Untuk mengukur tingkat output dari organisasi *sector Publik* terhadap target - target pendapatan sector public. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data - data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Formulasi efektivitas sebagai berikut :

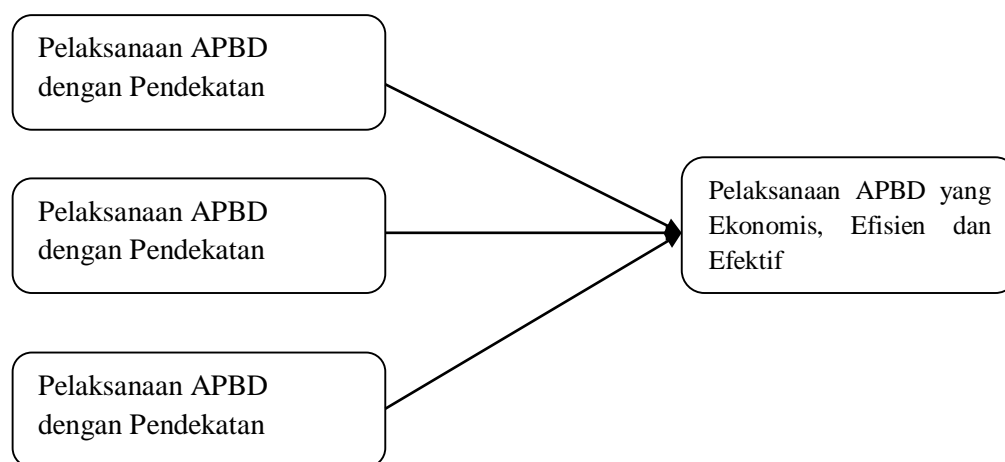
$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas

- ✧ Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti Efektif
- ✧ Jika diperoleh Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti Efektivitas berimbang
- ✧ Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak Efektif (Mahsun : 2012 : 187)

Kerangka Berpikir

Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk penilaian pelaksanaan APBD, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran adalah konsep Ekonomisasi, Efisiensi dan Efektivitas (*value of money*), karena merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan *good governance*. Ekonomisasi, Efisiensi dan Efektivitas (*value of money*) merupakan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis. Ekonomis berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output maksimal dengan jumlah input yang serendah-rendahnya. Efektivitas berarti penggunaan APBD harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik. Ekonomisasi, Efisiensi dan Efektivitas (*value of money*) dalam perencanaan anggaran sangat menekankan pada penggunaan standar biaya terendah. Untuk jelasnya kerangka berpikir dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 dan 2018

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka-angka dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang telah disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kupang seperti laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Anggaran dan realisasi tahun, 2016, 2017 dan 2018

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode analisis yang ditujukan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan/menghimpun data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan serta membandingkan target dan realisasi anggaran keuangan sesuai dengan teori yang sesuai. Alat – Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Ekonomisasi, Efisiensi dan Efektivitas sebagai berikut :

Pengukuran Tingkat Ekonomisasi:

Realisasi Pengeluaran

Tingkat Ekonomi = ----- x 100%

Anggaran Pengeluaran

Kriteria Ekonomi :

- ✧ Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis
- ✧ Jika diperoleh Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomi berimbang

- ✧ Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis (Mahsum : 2012 : 186)

Pengukuran Tingkat Efisiensi:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi:

- Sangat Efisien : <10%
Efisien : 10% - 20%
Cukup Efisien : 21% - 30%
Kurang Efisien : 31% - 40%
Tidak Efisien : >40% (Mahmudi : 2006 : 143)

Pengukuran Tingkat Efektivitas

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas

- Sangat Efektif : >100%
Efektif : 100%
Cukup Efektif : 90% - 99%
Kurang Efektif : 75% - 89%
Tidak Efektif : <75% (Mahmudi : 2006 : 143)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Pendapatan dan Belanja daerah

Indormasi tentang pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten Kupang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 - 2018
(Dinas PPKAD Kab.Kupang, 2019)

Keterangan	Tahun					
	2016		2017		2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	605,008,354,100	601,859,937,132	679,669,480,719	643,745,706,721	750,107,692,084	757,726,868,872
Belanja Daerah	777,783,380,647	671,373,439,791	769,983,638,509	691,319,530,872	857,629,778,269	756,888,587,797

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis merupakan pengukuran tingkat kehematan penggunaan atau realisasi pengeluaran dari anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan selama tahun 2011 - 2013, maka dilakukan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Ekonomis penggunaan Anggaran Tahun 2016 – 2018
(Data Sekunder olahan Penulis Tahun 2019)

Keterangan	Tahun	Perhitungan			%	Capaian
	2016	<u>671,373,439,791</u>	x	100%	86.32	Ekonomis
		777,783,380,647				
Tingkat Ekonomis	2017	<u>691,319,530,872</u>	x	100%	89.78	Ekonomis
		769,983,638,509				
	2018	<u>756,888,587,797</u>	x	100%	88.25	Ekonomis
		857,629,778,269				
Kriteria Ekonomis						
· Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis						
· Jika diperoleh Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomi berimbang						
· Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis						

Berdasarkan perhitungan dalam tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Anggaran pengeluaran / anggaran belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mulai dari tahun 2016 – 2018 masuk dalam kategori ekonomis yakni capaian realisasi belanja daerah berada di bawah standar capaian ekonomis sebesar 100% dimana untuk tahun 2016 capaian realisasi belanja sebesar 86,32%, capaian realisasi belanja ditahun 2017 sebesar 89,78% dan capaian realisasi belanja ditahun 2018 sebesar 88,25%.

Dengan demikian maka masih terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) selama tiga tahun yakni sisa lebih penggunaan anggaran untuk tahun 2016 sebesar 13,68%, sisa lebih penggunaan anggaran untuk tahun 2017 sebesar 10,22% dan sisa lebih penggunaan anggaran untuk tahun 2018 sebesar 11,75%. Hal ini menunjukkan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melakukan penghematan penggunaan anggaran belanja dalam setiap tahunnya. Penghematan dimaksud adalah penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada program tambahan atau program sisipan yang menimbulkan adanya peningkatan dana belanja yang mengakibatkan pengeluaran belanja melebihi jumlah dana yang ditargetkan sebelumnya. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (SILPA) sebagaimana dijelaskan di atas, diperlakukan sebagai sumber pembiayaan tahun berikutnya

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan tingkat ekonomi penggunaan anggaran tahun 2016 – 2018, maka dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Perkembangan Ekonomisasi Anggaran Tahun 2016 - 2018
(Sumber : Data sekunder olahan penulis Tahun 2019)

Keterangan	Tahun			Perubahan	
	2016	2017	2018	2017	2018
Tingkat Ekonomis	86.32	89.78	88.25	3.46	-1.53

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkembangan tingkat ekonomi penggunaan anggaran mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017

sebesar 3,46%, sedangkan untuk tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,53%

Analisis Efisiensi Pemungutan untuk memperoleh Pendapatan

Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan Pemerintah. Pemerintah sangat mengharapkan adanya efisiensi realisasi biaya pemungutan terhadap realisasi pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Untuk mengetahui efisiensi realisasi biaya pemungutan agar memperoleh pendapatan yang maksimal, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan Tingkat Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Tahun 2016 – 2018 (Data Sekunder olahan Penulis Tahun 2019)

Keterangan	Tahun	Perhitungan	%	Capaian
Tingkat Efisiensi	2016	$\frac{7,688,360,457}{601,859,937,132} \times 100$	1.28	Sangat Efisien
	2017	$\frac{6,224,243,830}{691,319,530,872} \times 100$	0.90	Sangat Efisien
	2018	$\frac{4,989,188,564}{756,888,587,797} \times 100$	0.66	Sangat Efisien
Kriteria Efisiensi Sangat Efisien : <10% Efisien : 10% - 20% Cukup Efisien : 21% - 30% Kurang Efisien : 31% - 40% Tidak Efisien : >40%				

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penggunaan biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah pada pemerintah Daerah kabupaten Kupang Tahun 2016 - 2018 masuk dalam kategori sangat efisien karena capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah < 10%. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil perhitungan efisiensi biaya untuk tahun 2016 capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 1,28% (1,28% < 10%), capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2017 sebesar 0,90% (0,90% < 10%) dan capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2018 sebesar 0,66% (0,66% < 10%).

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2016 – 2018, maka dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Perkembangan Efisiensi Biaya Tahun 2016 - 2018 (Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2019)

Keterangan	Tahun			Perubahan	
	2016	2017	2018	2017	2018
Tingkat Efisiensi	1.28	0.90	0.66	-0.38	-0.24

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa efisiensi biaya mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,38%, sedangkan untuk tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,24%

Analisis Efektivitas Penerimaan Daerah

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sangat mengharapkan adanya efektivitas realisasi pendapatan Daerah untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan daerah maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 7. Perhitungan Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2018 (Data Sekunder olahan Penulis Tahun 2019)

Keterangan	Tahun	Perhitungan			%	Capaian
	2016	<u>601,859,937,132</u>	x	100	99.48	Cukup Efektif
		605,008,354,100				
Tingkat Efektivitas	2017	<u>679,669,480,719</u>	x	100	105.58	Sangat Efektif
		643,745,706,721				
	2018	<u>750,107,692,084</u>	x	100	98.99	Cukup Efektif
		757,726,868,872				

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas realisasi pendapatan daerah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2016 – tahun 2018 masuk dalam kategori sangat efektif dan cukup efektif karena capaian realisasi pendapatan Daerah ada yang berada di bawah standar capaian efektivitas sebesar 100% dan ada yang berada di atas standar efektivitas 100%. Hasil perhitungan efektivitas pendapatan daerah untuk tahun 2016 capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah kabupaten Kupang sebesar 99,48% berada dibawah standar efektivitas sehingga dapat dinilai masuk dalam kategori cukup efektif. Capaian efektivitas pendapatan daerah tahun 2016 masih berada di bawah 100% disebabkan oleh beberapa factor antara lain penerimaan sumber pendapatan daerah yakni pajak daerah untuk tahun 2016 tidak mencapai target dimana target sebesar Rp. 1,908,204,000 dan realisasinya hanya mencapai Rp. 1,592,031,015 atau realisasi penerimaan pajak daerah hanya mencapai 83,43%, selanjutnya komponen penerimaan daerah lainnya yakni retribusi daerah dimana target penerimaan sebesar Rp. 4,775,356,000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,333,054,013 atau realisasi retribusi daerah hanya mencapai 48,86%

Capaian realisasi pendapatan daerah pemerintah kabupaten Kupang ditahun 2017 sebesar 105,58%, capaian ini berada di atas standar efektivitas pendapatan Daerah sehingga dinilai masuk dalam kategori sangat efektif. Capaian ini disebabkan beberapa hal antara lain karena realisasi pajak daerah mencapai 148,16% dimana target penerimaan pajak sebesar Rp.1,970,950,000 sedangkan realisasinya mencapai Rp.2,920,224,743; realisasi retribusi daerah mencapai 114,41% dimana target penerimaan sebesar Rp.4,819,610,000 sedangkan realisasinya sebesar Rp.5,514,027,365; pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya mencapai 109,90% dengan target penerimaan sebesar Rp.19,794,917,312

sedangkan realisasinya sebesar Rp. 21,755,388,487; lain – lain pendapatan asli daerah yang sah realisasinya mencapai 110,27% dengan target penerimaan sebesar Rp. 9,154,775,000 sedangkan realisasinya mencapai Rp.10,094,584,087

Capaian realisasi pendapatan daerah pemerintah kabupaten Kupang ditahun 2018 sebesar 98,99% berada dibawah standar efektivitas sehingga dapat dinilai masuk dalam kategori cukup efektif. Capaian ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain realisasi retribusi daerah hanya mencapai 45,60% dimana target penerimaan sebesar Rp.14,760,548,300 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6,731,355,518; lain – lain pendapatan yang sah realisasinya mencapai 74,14% dimana target penerimaan sebesar Rp. 11,000,000,000 sedangkan realisasinya Rp. 8,155,397,382 .Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan tingkat efektivitas penggunaan anggaran tahun 2016 – 2018, maka dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8. Perkembangan Efektivitas Pendapatan Tahun 2016 - 2018
(Data Sekunder Olahan Penulis)

Keterangan	Tahun			Perubahan	
	2016	2017	2018	2017	2018
Tingkat Efektivitas	99.48	105.58	98.99	6.10	-6.59

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 6,10%, sedangkan untuk tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,59%.

E. KESIMPULAN

- 1) Untuk pengukuran Ekonomis; Penggunaan Anggaran belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2016 – 2018 masuk dalam kategori ekonomis
- 2) Untuk pengukuran Efisiensi Biaya ; penggunaan biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten Kupang Tahun 2016 - 2018 masuk dalam kategori sangat efisien karena capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah < 10%.
- 3) Untuk pengukuran efektivitas pendapatan; realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kupang untuk tahun tahun 2016 dalam kategori cukup efektif , untuk tahun 2017 dalam kategori sangat efektif dan tahun 2018 penerimaan pendapatan daerah masuk dalam kategori cukup efektif.

SARAN

- 1) Untuk pengukuran Ekonomis; Penggunaan Anggaran belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2016 – 2018 telah mencapai kategori ekonomis sehingga disarankan agar kedepan pemerintah mempertahankan kan capaian penggunaan anggaran tersebut
- 2) Untuk pengukuran Efisiensi Biaya ; penggunaan biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten Kupang Tahun 2016 – 2018 masuk dalam kategori sangat efisien karena capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah < 10%. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah tetap mempertahankan kondisi sekarang agar penggunaan biaya tetap pada kondisi sangat efisien

- 3) Untuk pengukuran efektivitas pendapatan; realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kupang untuk tahun 2016 dan 2018 disarankan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga realisasinya bias mencapai kategori sangat efektif ditahun selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014; *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hariadi Pramono. 2016; *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta,
- Hirawan Susiyati B. "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Dalam Arsyad Anwar (Editor), *Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Indra Bastian. 2011; *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta,
- Mahmudi. , 2017; *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mohamad Mahsun. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta,
- Mulyana Budi. 2015; *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta,
- Peraturan Pemerintah Nomor 105, Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.